Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan **ISSN: 3025-4345**
Vol. 3 No. 2, Mei 2025, Hal. 07-11
https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SWADAYA KORBAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN KOLAKA

[1)]Selvieni, [2)]Achmad Lamo Said, [3)]Mardiana
[(1,2,&3)]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
email: [1]selvieni24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Pembangunan Perumahan Khusus, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi korban bencana kebakaran di Kabupaten Kolaka. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan enam informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022. Melalui program ini, masyarakat korban kebakaran dapat memiliki rumah layak huni, dengan realisasi pembangunan 14 rumah yang dijadwalkan secara bertahap pada tahun 2024. Anggaran yang digunakan adalah sekitar Rp 35.000.000 untuk tahap pertama, dan Rp 15.000.000 untuk tahap kedua per rumah pada tahun 2024. Implementasi bantuan ini melibatkan beberapa sektor, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemerintah Kelurahan Sabilambo, dan masyarakat sebagai penerima bantuan. Kerjasama antar sektor terlihat dalam komunikasi lintas dinas untuk memastikan pelaksanaan bantuan secara efektif. Selain itu, dukungan sosial, ekonomi, dan politik juga diberikan, yang berdampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan serta masyarakat sekitar, termasuk para pekerja dan pengusaha lokal yang terlibat dalam pembangunan. Secara politis, pemerintah mendukung melalui regulasi dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan bantuan bagi korban kebakaran.

Kata Kunci*:* Implementasi; Program; Rumah Swadaya; Agen Pelaksana; Komunikasi

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Special Housing Development Assistance Program, especially the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) for fire disaster victims in Kolaka Regency. The method used is a descriptive qualitative approach, with primary data collection through interviews and observations, and secondary data through documentation studies. Interviews were conducted with six informants selected using purposive sampling techniques. The results of the study indicate that the implementation of the BSPS program in Kolaka Regency has been carried out in accordance with Ministerial Regulation Number 7 of 2022. Through this program, fire victims can have decent housing, with the realization of the construction of 14 houses scheduled in stages in 2024. The budget used is around IDR 35,000,000 for the first phase, and IDR 15,000,000 for the second phase per house in 2024. The implementation of this assistance involves several sectors, including the Housing and Settlement Areas Service, Social Service, Sabilambo Village Government, and the community as recipients of assistance. Cooperation between sectors is seen in cross-agency communication to ensure effective implementation of assistance. In addition, social, economic, and political support was also provided, which had a positive impact on the socio-economic conditions of

aid recipients and the surrounding community, including local workers and entrepreneurs involved in the development. Politically, the government supported through regulations and documents needed to apply for aid for fire victims.

Keywords: Implementation; Program; Self-Help Home; Implementing Agent; Communication

PENDAHULUAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tujuan dari BSPS ini Membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun/meningkatkan kualitas rumah layak huni. Membangun kesadaran sosial, gotong-royong, dan kapasitas kelompok miskin dalam memperoleh hunian layak. Memberikan bantuan bagi korban bencana (kebakaran, bencana alam, atau sosial) di Kabupaten Kolaka. Bentuk Bantuan Uang tunai sebesar Rp 50.000.000 per penerima (2021–2023). Fokus pada pembangunan baru (Pembangunan Baru Rumah Swadaya/PBRS) atau perbaikan rumah tidak layak huni (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya/PKRS). Masalah Implementasi Program BSPS Prosedur Administrasi - Pencairan dana berbelit-belit dan tidak sesuai jadwal, menghambat pelaksanaan program. Pengadaan barang tidak merata: sebagian penerima sudah mencapai 50% pembangunan, sementara lainnya masih di tahap awal. Ketidaksesuaian dengan Petunjuk Teknis waktu pelaksanaan melebihi batas 2 bulan yang ditetapkan, beberapa rumah dibangun dengan ukuran tidak sesuai aturan atau tanpa sertifikat. kurangnya Koordinasi dan Kesadaran masyarakat, masyarakat acuh tak acuh dalam melaporkan perkembangan pembangunan.

Teori implementasi kebijakan definisi implementasi adalah proses mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Adapun Faktor Keberhasilan, Sumber daya memadai (SDM, dana, sarana), Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, Faktor Kegagalan Kebijakan tidak jelas/tidak realistis, Kurang informasi dan dukungan, Sikap pelaksana yang tidak mendukung. Tahapan Implementasi (Menurut Van Meter & Horn): Penetapan standar dan sasaran, Pengorganisasian sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Pemantauan dan evaluasi, kriteria dan Persyaratan Penerima BSPSKriteria Kabupaten/Kota Tingkat kemiskinan tinggi dan kekurangan rumah, prioritas untuk daerah terdampak bencana atau program khusus pemerintah. Syarat Penerima Individu WNI berkeluarga, Memiliki tanah dengan hak sah, Belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya, Penghasilan ≤ Upah Minimum Provinsi. Kriteria Rumah, tanah bebas sengketa, sesuai tata ruang, rumah tidak layak huni (konstruksi rusak, sanitasi buruk, luas <9 m²/orang). Standar Rumah Layak Huni ialah mulai dari Keselamatan Bangunan misalnya Pondasi, struktur, dan atap memenuhi standar teknis. Kesehatan Penghuni Ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi memadai. Luas Minimum Ruang tidur dan serbaguna dengan fasilitas sanitasi. Rekomendasi ada Perbaikan prosedur pencairan dana dan distribusi barang, Sosialisasi kebijakan secara intensif kepada masyarakat, Penguatan koordinasi antar instansi dan pemantauan berkala. Dokumen ini menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang efektif untuk menjamin keberhasilan program BSPS dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu maupun kelompok dalam konteks suatu fenomena sosial (Creswell, 2017). Kajian ini secara khusus menelusuri pelaksanaan Program Bantuan

ISSN 3025-4345

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat terdampak korban bencana kebakaran di Kabupaten Kolaka yang diinisiasi oleh dinas PKP Kolaka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kolaka dengan pertimbangan bahwa dikabupaten Kolaka diterapkan permen PKP dalam bentuk pemberian program stimulant perumahan swadaya untuk korban bencana kebakaran dikabupaten Kolaka yang dinisiasi oleh dinas PKP. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn, terdapat enam faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, yaitu :

1. Ukuran dan Sasaran Kebijakan.
   Keberhasilan pelaksanaan kebijakan hanya dapat dinilai secara akurat apabila ukuran dan sasaran kebijakan tersebut sesuai dan realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di level Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Korban Bencana Kebakaran Di Kabupaten Kolaka Yang Diinisiasi Oleh Dinas PKP kolaka
2. Sumber Daya
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam upaya kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Korban Bencana Kebakaran Di Kabupaten Kolaka Yang Diinisiasi Oleh Dinas PKP kolaka
3. Ciri-ciri Pelaksana Kebijakan
   Fokus utama pada pelaksana kebijakan meliputi organisasi formal maupun informal yang terlibat dalam menjalankan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dari para pelaksana tersebut. Selain itu, cakupan wilayah pelaksanaan juga harus diperhatikan; semakin luas wilayah yang dicakup, maka keterlibatan pelaksana dari masyarakat dan pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Kolaka, harus semakin besar.
4. Sikap dan Orientasi Pelaksana.
   Keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada sikap para pelaksana, apakah mereka menerima atau menolak kebijakan tersebut. Sikap negatif sering muncul apabila kebijakan dirancang tanpa melibatkan langsung pihak-pihak yang memahami dan mengalami masalah yang hendak diselesaikan.
5. Komunikasi dan Koordiasi Antar Pelaksana.
   Kolaborasi dan komunikasi yang berjalan dengan baik antar pihak terkait memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tingkat koordinasi yang tinggi cenderung meminimalkan potensi hambatan selama proses implementasi berlangsung, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, dan sebaliknya.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Lingkungan Sekitar.
   Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di luar lingkup kebijakan turut memengaruhi sejauh mana suatu kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Pengamatan (*observation*), Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, termasuk aktivitas dan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian.
2. Wawancara (*interview*), Wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna memahami makna suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017).
3. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh bahan seperti foto, catatan lapangan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

ISSN 3025-4345

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dirancang sebagai upaya untuk mendukung pembangunan tempat tinggal yang layak secara mandiri bagi warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Kolaka. Peneliti berharap temuan dalam kajian ini dapat menjadi masukan berharga dalam pelaksanaan kebijakan serupa di masa mendatang. Dengan pelaksanaan yang tepat, program ini diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang layak, aman, nyaman, dan sehat, terutama bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.

Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Kolaka berikut hasil dan pembahasannya berdasarkankan kutipan wawancara sesuai indikator:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal perumusan. Standar berfungsi sebagai tolak ukur kinerja, sedangkan tujuan memberikan arah pencapaian yang diharapkan. Dalam konteks Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), indikator keberhasilan program berkaitan erat dengan pencapaian target Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan swadaya.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, kebijakan yang telah dirancang secara objektif harus didukung oleh kualitas sumber daya yang memadai, baik dari aspek manusia maupun materiil. Sumber daya manusia, finansial, dan alokasi waktu merupakan elemen krusial yang saling berkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Berdasarkan pernyataan informan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditujukan khusus bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berswadaya serta memiliki komitmen dalam mewujudkan hunian yang layak. Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui bantuan stimulan. Bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk pembiayaan penuh, melainkan berupa dana sebesar Rp50.000.000 per unit rumah yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik dalam bentuk kontribusi materiil maupun penyediaan fasilitas pendukung dalam proses pembangunan rumah.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor lingkungan eksternal memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks sosial masyarakat, sering kali dijumpai berbagai dinamika seperti ketegangan antar kelompok etnis, kurangnya keharmonisan antara warga dengan aparat pemerintahan, serta kondisi mata pencaharian yang tidak stabil, yang semuanya dapat menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan secara optimal, tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif, lingkungan eksternal yang tidak mendukung seringkali menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keberadaan kondisi lingkungan yang kondusif sangat menentukan kelancaran jalannya suatu program, termasuk dalam konteks implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Kabupaten Kolaka, implementasi program ini menjadi bagian dari kajian evaluatif terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan.

ISSN 3025-4345

4. Sikap Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana. Jika mereka tidak merasa memiliki keterlibatan dalam perumusan kebijakan, potensi penolakan atau kurangnya komitmen dapat terjadi, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Berdasar anggapan informan ditarik sebuah simpulan bahwa dibutuhkan kerjasama anta para stakeholder dalam memaksimalkan pelaksanaan program BSPS seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan program BSPS dalam hal ini mampu berswadaya.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin efektif komunikasi dan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka potensi terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi dapat meningkatkan risiko kegagalan kebijakan.

Proses pembangunan selalu diawali dengan perencanaan yang memerlukan data yang valid. Dalam konteks Program BSPS, Dinas PKP sebenarnya telah memiliki data calon penerima bantuan. Namun, pembaruan data tetap diperlukan agar bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kemampuan swadaya.

Berdasarkan pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di tingkat desa kerap menghadapi kendala berupa kesalahan manusia (human error). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan aparatur desa/kelurahan, serta kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dan tujuan dari program tersebut. Pandangan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Bidang Penanganan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparat desa dalam mendukung keberhasilan implementasi program.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh situasi di luar struktur kebijakan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Jika lingkungan eksternal tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan. Oleh sebab itu, penting bagi para pelaksana kebijakan untuk mempertimbangkan stabilitas dan dinamika lingkungan sekitar dalam setiap tahap implementasi.

Program BSPS memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Kolaka. Program ini memberikan bantuan berupa fasilitas bahan bangunan untuk pembangunan rumah layak huni, yang berdampak pada meningkatnya aktivitas toko bangunan dan pendapatan karyawan di sektor tersebut. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja bagi tukang dan pekerja konstruksi di wilayah tersebut.

Program BSPS berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sejahtera. Kondisi rumah yang layak, dengan atap, dinding, dan lantai yang memadai, merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah yang layak huni tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berkontribusi dalam pencegahan stunting serta mendukung kualitas proses belajar anak di dalam rumah.

ISSN 3025-4345

SIMPULAN

Pelaksanaan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Kolaka terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri nomor 7 tahun 2022 dimana melalui program BSPS ini masyarakat korban bencana kebakaran akhirnya mampu memiliki rumah layak huni yang dibangun oleh pemerintah. Realisasi bantuan ditahun 2024 sebanyak 14 rumah terbangun secara bertahap. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan ini berupa anggaran bantuan sekitar Rp 35.000.000 yang diberikan ditahap pertama dan pada tahap kedua senilai Rp 15.000.000 per rumah di tahun 2024. Implementasi bantuan swadaya ini melibatkan beberapa sektor yakni Dinas PKP(perumahan dan kawasan permukiman), Kabupaten Kolaka, Dinas Sosial, Pemerintah kelurahan sabilambo, dan masyarakat selaku penerima bantuan. Sektor yang terlibat sebagai agen pelaksana menjalin kerjasama sinergitas dalam pelaksaan bantuan swadaya, ditujukan dengan adanya komunikasi lintas sektor antar dinas sosial dan PKP terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan swadaya. Implementasi bantuan swadaya ini mendapat dukungan sosial, ekonomi maupun politik, dimana adanya bantuan ini membawa dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat sekitar khususnya para pekerja yang terlibat dalam pembangunan rumah swadaya ini, dan pengusaha lokal selaku pemasok material bangunan. Secara politis pemerintah memberi dukungan dalam bentuk regulasi ataupun persyaratan dalam pengajuan bantuan berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan atas rumah swadaya korban bencana kebakaran yang merupakan bencana non alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas PKP Kabupaten Kolaka, para informan, dan Universitas Sembilanbelas November Kolaka atas dukungan dan kontribusinya dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat. (2023). *Metode Campuran dalam Penelitian. Solo. LITRUS*

Meter, D. V. (2016). *Model-model dalam Kebijakan Implementasi.* Yogyakarta: Rineka Cipta.

Bone, Dewi. T. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.* Makassar: UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Desyra. (2021). *Kebijakan Publik.* Jakarta: Graha Ilmu.

Dunn, William N. 2016. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogsyakarta: Gadjah Mada University Press.

John W. Creswell, (2017). *research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.*

ISSN 3025-4345